



BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

RENSTRA

2024 - 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan, sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024-2026 dapat diselesaikan dengan baik. RENSTRA dimaksud disusun dan memuat uraian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Minahasa dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi

Selanjutnya untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran dan program tersebut diharapkan masing-masing komponen dalam Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Minahasa dapat menyelaraskan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dengan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan dalam penjabaran APBD Kabupaten Minahasa setiap tahunnya. Disamping itu juga dapat dipergunakan untuk pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta sebagai dasar pelaporan Akuntabilitas Kinerja yang merupakan tolak ukur Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP).

TONDANO, MEI 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 3

1.3 Maksud dan Tujuan 8

1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH10

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 10

2.2 Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan
Asset Daerah 20

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan
dan Asset Daerah23

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah..... 27

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SKPD.....29

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas
dan Fungsi Pelayanan SKPD29

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Terpilih29

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 33

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....35

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan
Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah 35

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN43

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN71

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... 72

BAB VIII PENUTUP..... 85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan sistem akuntabilitas agar dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut memerlukan adanya Rencana Strategis (Renstra) sebagai tolok ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berisikan tentang gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, tujuan, strategi dan kebijakan serta program-program yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah. Renstra PD disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD dijabarkan ke dalam program tahunan yang disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang berisikan tentang sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan partisipasi masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa 2005-2025, analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPDP Kabupaten Minahasa 2005-2025 Tahap Keempat atau yang terakhir, serta isu strategis yang aktual. Sebagai implikasi dari Pilkada Serentak Tahun 2024, dokumen RPD

ini disusun untuk mengisi absensi dokumen rencana pembangunan daerah jangka menengah. Tanpa adanya visi dan misi kepala daerah, visi dan misi dalam dokumen RPD ini akan merujuk pada visi dan misi RPJPDP 2005-2025 dan analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPDP 2005-2025 Periode Keempat seperti yang telah ditegaskan sebelumnya. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Minahasa telah melaksanakan kewajibannya untuk menyusun Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dalam pelaksanaannya, Renstra tersebut akan dijabarkan kembali ke dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) yang memuat prioritas program dan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Kemudian hasil capaian program dan Kegiatan tersebut wajib diinformasikan dan dilaporkan kepada stakeholders, yang dituangkan melalui Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPj). RENCANA STRATEGIS Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dilahirkan sebagai bentuk pembenahan manajemen aparatur sipil negara dengan tujuan pencapaian pelaksanaan berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Pembenahan tersebut hendaknya dilakukan secara simultan disegala bidang secara berkesinambungan dan terintegrasi satu sama lain.

Reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business proses*) dan sumber daya manusia aparatur,

sebagaimana esensi dari reformasi birokrasi yakni integritas, etos kerja dan gotong royong diharapkan manfaat sekurang-kurang dapat diperoleh sebuah implementasi birokrasi yang di dalamnya menggambarkan proses demokratisasi, efektivitas dan efisiensi birokrasi, transparansi dan akuntabilitas serta tanggungjawab dalam kerangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pada Akhirnya Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa dan menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka pendek serta membantu pimpinan organisasi dalam mengelola dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam melakukan perubahan sistem untuk mendukung pencapaian visi, misi, Nawa Cita DAN Kegiatan Unggulan Pemerintah Kabupaten Minahasa

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018 - 2023, memperhatikan arah dan kebijakan yang bersumber dari beberapa regulasi peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

- (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 11 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan

- Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
 27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 30. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2008 - 2028;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tahun 2018- 2023;
 33. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Minahasa Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa.

1.3. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

1. Sebagai perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel;
2. Sebagai titik awal guna melakukan pengukuran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);
3. Sebagai kebutuhan nyata untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan mengantisipasi adanya perubahan lingkungan strategis;
4. Sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

B. TUJUAN

1. menjabarkan Visi dan Misi kepala daerah sesuai dengan tupoksi BPKAD dalam periode jangka menengah;
2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPKAD dan perencanaan penganggaran;
3. Menetapkan strategi dalam rangka beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategi guna mewujudkan keberhasilan dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SKPD

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010, maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan diatas Pemerintah Kabupaten Minahasa telah membentuk Peraturan Bupati Minahasa Nomor 29 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah serta tugas pembantuan di bidang Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Untuk melakukan tugas dimaksud Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Pengkoordinasian penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD bersama TAPD;

3. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian anggaran di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
5. Pengkoordinasian integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatan baik dalam lingkungan Dinas maupun Instansi atau unit kerja lain yang terkait;
6. Pengkoordinasian, perencanaan, dan perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah;
7. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelayanan administrasi ketatausahaan meliputi Perencanaan Program, Keuangan, Kepegawaian dan Umum;
8. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dalam rangka Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
9. Pelaksanaan evaluasi kegiatan; dan
10. Penyusunan dan Penyampaian laporan kegiatan.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi diatas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa terdapat susunan organisasi yang terdiri dari :

1.2 Kepala Badan

2.2 Sekretaris Badan

3.2 Sekretariat, membawahi 3 (tiga) subbagian, yaitu

- a. Subbagian Program, Keuangan dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian; dan
- c. Subbagian Umum dan Perlengkapan

4. Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang perencanaan anggaran, pengendalian otorisasi serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Badan , membawahi 2 (dua) seksi, yaitu:

- a. Seksi Anggaran;
 - b. Seksi Pengendalian dan Otorisasi
5. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pengelolaan belanja pegawai dan non pegawai, pengawasan dan pelaporan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan dan membawahi 2 (dua) seksi, yaitu :
- a. Seksi Pengelolaan Belanja dan Pembiayaan ; dan
 - b. Seksi Pengawasan.
6. Bidang Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang akuntansi pembukuan dan verifikasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan dan membawahi 2 (dua) seksi yaitu:
- a. Seksi Akuntansi
 - b. Seksi Pelaporan
7. Bidang Aset Daerah dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang pembukuan dan pendataan aset daerah, pembinaan dan evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberika oleh Kepala Badan, dan membawahi 2 (dua) seksi yaitu :
- a. Seksi Pembukuan dan Pendataan Aset Daerah; dan
 - b. Seksi Pembinaan dan Evaluasi
8. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari 2 (dua) jabatan fungsional tertentu, yaitu:
- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai keahlian
 - b. Kelompok Jabatang Fungsional terdiri dari jumlah tenaga jabatan fungsional.

Adapun tugas dari Kepala Badan, Sekretariat dan Bidang adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas

- a. menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan Badan;
- b. merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk dilaksanakan oleh sekretariat, bidang, subbag dan subbidang;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja Badan dengan cara mengadakan pertemuan secara rutin dengan seluruh pegawai Badan untuk mendapatkan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan serta menemukan solusi pemecahan masalah terhadap kendala yang dihadapi;
- d. mengkoordinasikan penyusunan arah kebijakan umum, strategi dan prioritas APBD Kabupaten Minahasa bersama-sama dengan Tim Eksekutif dan Legislatif;
- e. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan pedoman penyusunan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD dan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
- f. mengkoordinasikan dan mengarahkan penetapan surat penyediaan dana, penerbitan surat perintah pencairan dana serta pemrosesan usulan penunjukan pengelola keuangan daerah;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah, pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas daerah serta rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;

- h. mengkoordinasikan pelaksanaan penerbitan surat keterangan pemberhentian pembayaran, pemungutan / pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) serta restitusi/pengembalian kelebihan pendapatan;
- i. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan akuntansi keuangan daerah, pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan aset daerah, penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta penyajian informasi keuangan dan aset daerah;
- j. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan pedoman, pembinaan dan pelaksanaan administrasi aset daerah, pembinaan pengelolaan keuangan SKPD se-Kabupaten Minahasa serta evaluasi rancangan APBD, rancangan Perubahan APBD dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- k. pemrosesan tuntutan pengelolaan keuangan dan tuntutan ganti rugi;
- l. mengkoordinasikan penatausahaan atas investasi, pinjaman daerah, obligasi daerah dan pembiayaan daerah lainnya serta pembinaan pengelolaan keuangan BLUD;
- m. mengevaluasi hasil pekerjaan bawahan serta menyempurnakannya agar didapat hasil kerja yang berkualitas sebagai bahan pengambilan keputusan dan kebijakan lebih lanjut oleh pimpinan;
- n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier;

- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- p. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat dan protokol; Dalam melaksanakan tugas tersebut sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Badan;
- b. pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor, pemanfaatan dan perawatan inventaris kantor;
- c. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi Kepala Badan dan semua unit organisasi di lingkungan Badan;
- d. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, organisasi, hukum, rumah tangga, hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah lain dan hubungan masyarakat;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), penyiapan bahan dan penyusunan Renstra, Renja/RKT, LPPD, laporan kinerja badan dan surat menyurat; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, dalam penyusunan anggaran daerah; Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rancangan, penetapan dan perubahan APBD sebagai dasar pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
- b. pembinaan dan bimbingan teknis penyusunan anggaran SKPD;
- c. verifikasi dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan anggaran SKPD;
- d. penyusunan laporan di bidang anggaran daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas membukukan serta meneliti berkas-berkas dan bukti penerimaan, melakukan proses dan mekanisme pengeluaran. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pembukuan terhadap semua jenis penerimaan dan pengeluaran daerah;
- b. pelaksanaan evaluasi terhadap seluruh data penerimaan dan pengeluaran;
- c. pendokumentasian pembukuan dan laporan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan analisis terhadap sistem dan mekanisme pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Akuntansi dan Verifikasi

Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan proses akuntansi keuangan daerah, mengidentifikasi, mengukur, mencatat pelaksanaan APBD sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah yang

dapat disajikan sebagai informasi untuk bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Bidang Akuntansi dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan, perumusan kebijakan teknis dan pengendalian di bidang akuntansi;
- b. pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- c. mengkonsolidasikan laporan keuangan SKPD;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

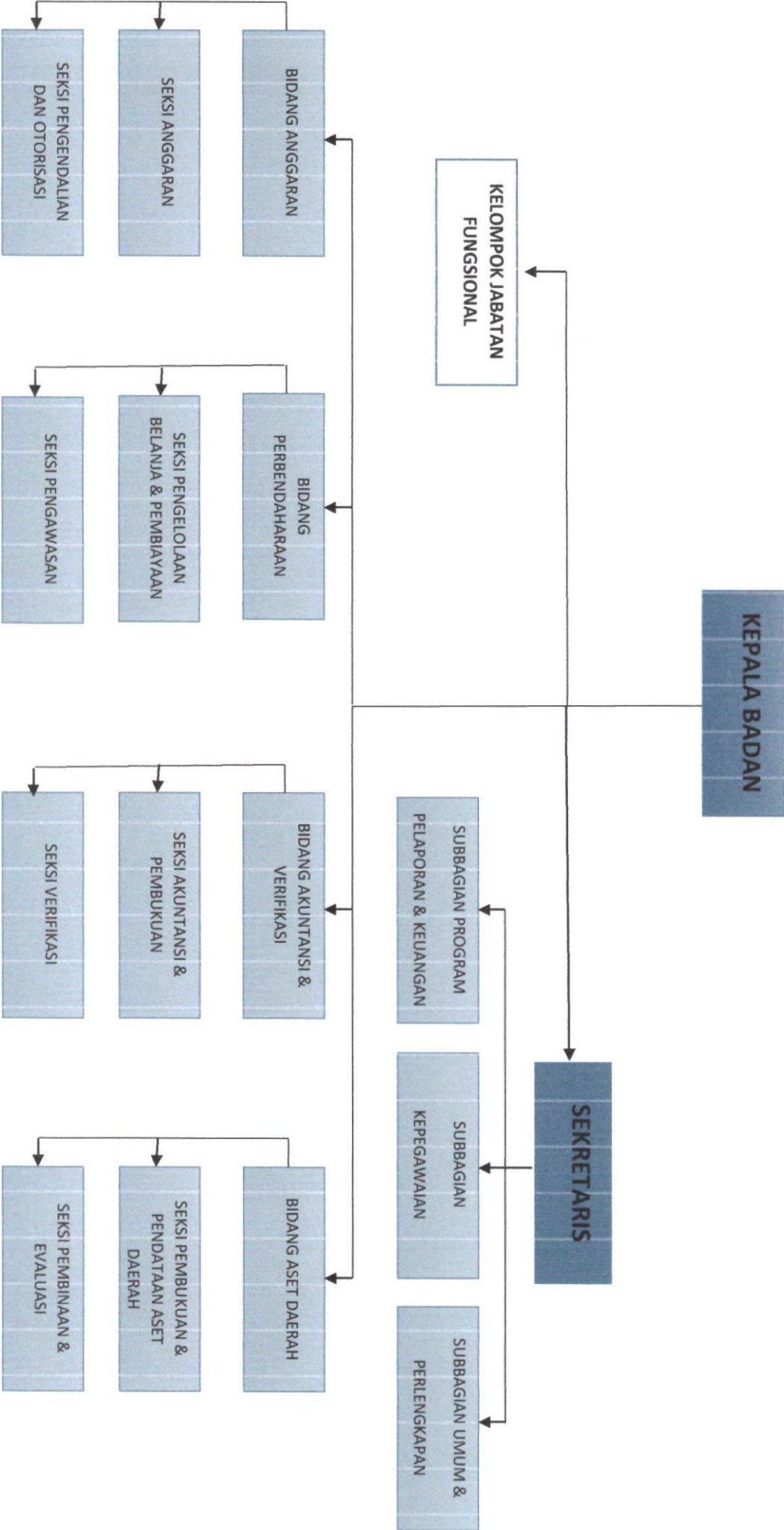
6. Bidang Aset Daerah dan Pembinaan

Bidang Aset Daerah dan Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan program pengelolaan aset daerah termasuk inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, pemeriksaan, penghapusan dan keamanan aset daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Aset Daerah dan Pembinaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana pengelolaan aset daerah;
- b. Pengumpulan dan pengelolaan data aset daerah dalam rangka penyusunan neraca daerah;
- c. pengadministrasian aset daerah;
- d. pelaksanaan inventarisasi aset daerah;
- e. pemeliharaan dan keamanan aset daerah yang belum dikelola SKPD;
- f. pemeriksaan dan pengawasan aset daerah;
- g. penghapusan aset daerah;
- h. pelaporan barang inventarisasi daerah;

- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai tugas dan fungsinya.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MINAHASA



2.2 Sumber Daya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara administrasi maupun operasional pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa perlu adanya dukungan sumber daya manusia dan asset/sarana dan prasarana yang dimiliki, adapun sumber daya tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia atau personil yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa dalam rangka membantu kelancaran tugas – tugas dinas berjumlah 49 orang dengan perincian :

a. Pegawai menurut golongan/ruang adalah sebagai berikut :

NO	GOLONGAN / RUANG	JUMLAH (ORANG)
1	PEMBINA (IV/a)	4
2	PENATA TK.I (III/d)	21
3	PENATA (III/c)	2
4	PENATA MUDA TK.I (III/b)	6
5	PENATA MUDA (III/a)	3

b. Pegawai Menurut Latar Belakang Pendidikan Formal adalah sebagai berikut :

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	S – 2 (PASCA SARJANA)	8
2	S – 1 (SARJANA)	22
3	D – 3 (DIPLOMA 3)	1

4	SLTA	3
---	------	---

c. Pegawai menurut Eselon adalah sebagai berikut :

NO	ESELONISASI	JUMLAH (ORANG)
1	KEPALA BADAN (ESELON II)	1
2	SEKRETARIS (ESELON III)	1
3	KEPALA BIDANG (ESELON III)	4
4	KEPALA SUB BAGIAN (ESELON IV)	1
5	KEPALA SEKSI (ESELON IV)	8
6	JF ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH MUDA	1
7	JF ANALIS KEBIJAKAN	1

2. SARANA DAN PRASARANA

Adapun asset/sarana dan Prasarana yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Minahasa guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugastugas Badan adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	KONDISI		KET
		BAIK	RUSAK	
1	RODA EMPAT	6		
2	RODA DUA	1		
3	KOMPUTER / PC	40	35	5
4	PRINTER	40	30	10
5	LAPTOP	20	14	6

6	SCANNER	2	2	
7	AC	11	7	4
8	KURSI KERJA	70	35	35
9	KURSI RAPAT	12	8	4
10	KURSI PEJABAT	6	4	2
11	UPS	30	6	24
12	UPS SERVER	2	2	
13	MEJA KERJA PEJABAT	7	7	
14	MEJA KERJA	55	45	10
15	MEJA RAPAT	2	1	1
16	GENSET	1	1	
17	SOFA	5	4	1
18	LEMARI ES	6	6	
19	DISPENSER	7	6	1
20	LEMARI MAKAN	2	2	
21	EXHAUSTER FAN	1		
22	KOMPOR GAS	1	1	
23	TABUNG GAS	1	1	
24	TANGGA ALUMINIUM	1		
25	TELEVISI	9	3	6
26	HANDYCAM	1	1	
27	STABILISER	1		
28	DRONE	1	1	
29	MESIN SIDIK JARI	1	1	
30	FACSMILI			
31	SERVER	3	2	
32	CCTV	1	1	

33	PAPAN STRUKTUR	1	1	
34	PAPAN NAMA INSTANSI	1	1	
35	PROYEKTOR + ATTACHMENT	2		
36	ALMARI BESI	11	11	
37	LEMARI KACA	6	6	
38	ALAT PENGHANCUR KERTAS	4	2	2
39	GORDEN	2	1	1
40	MESIN POTONG RUMPUT	1	1	
41	WIRELESS	2		
42	ALAT HIASAN (BUNGA)	22	12	10
43	HARD DISC EXTERNAL	23	4	19
44	MESIN HITUNG	2	2	
45	KURSI BESI (KURSITUNGGU)	4	3	1
46	METER DIGITAL LASER	1		
47	ALAT DAPUR			
48	PERALATAN KOMPUTER			
49	SOFTWARE	1		
50	PERKAKAS BENGKEL KERJA			

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam keuangan daerah dan pengelolaan aset/barang daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses

pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan aset/barang daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan SKPD. Selain melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset/barang daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset/barang daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa mengikuti peraturan perundangundangan yang berlaku.

Kegiatan pelayanan di BPKAD meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan dan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran dan rencana kebutuhan barang, pedoman penatausahaan keuangan dan aset daerah, pedoman pelaporan keuangan perangkat daerah. Selain itu BPKAD melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sedangkan dalam pengelolaan aset daerah yakni berupa pemberian pedoman penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Minahasa.

TARGET PENCAPAIAN KINERJA DAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MINAHASA

NO.	BIDANG URUSAN / INDIKATOR	2021		2022	
		TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN (TRIWULAN III)
1	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	61.42%	71,80 %	61.63%	21.65%
2	Rasio PAD	8.05%	6,63%	8.07%	11.43%
3	Rasio belanja urusan pemerintahan Umum (Dikurangi tranfer Expenditures)	81.55%	80,32%	81.37%	57.52%
4	Perda APBD Tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Dalam Proses
6	Perda Pertanggungjawaban APBD tepat waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu

RENSTRA 2024-2026

7	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda Tahun 2022 setelah audit BPK tahun 2023
8	Nilai IKM Badan Pendapatan Daerah	N/a	N/a	92.2	92.88
9	Deviasi Realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-5.54%	-6.75%	-5.25%	-55.21%
10	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	-4.83%	13.64%	-4.40%	-22.23%
11	Management Aset	Ya	Ya	Ya	Ya
12	Persentase Laporan BMD perangkat Daerah sesuai aturan	100%	100%	100%	100%
13	Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun Sebelumnya	1.77%	6.75%	1.23%	Realisasi Anggaran sisa setelah T.A. berakhir

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa.

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa, dapat dilakukan dengan menggunakan analisa metode SWOT

1. Faktor Internal :

a. Kekuatan/Potensi (*Strength*)

1. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
2. Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi;
3. Tersedianya sarana kerja yang memadai diantaranya berupa program aplikasi komputer dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
4. Kemampuan SDM berasal dari personil yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah;
5. Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. Kelemahan (*Weaknes*)

1. Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa tempat penyimpanan dokumen;
2. Masih terbatasnya ruangan tempat kerja

2. Faktor Eksternal :

a. Kesempatan/Peluang (*Oportunity*)

1. Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah;
2. Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik;
3. Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh PD dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan dan aset/barang daerah;

b. Tantangan/Ancaman (*Treath*)

1. Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan good governance;
2. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan aset/barang daerah di PD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah di PD;
3. Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan semakin ketat dan meningkat intensitasnya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD.

Ada beberapa permasalahan yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD kabupaten Minahasa, diantaranya adalah :

1. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang menegaskan adanya perubahan bahwa laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis akrual yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual;
2. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan barang daerah di OPD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang daerah di OPD. Hal ini menyebabkan banyak terjadi kesalahan/kekeliruan baik dalam pengajuan anggaran kegiatan maupun pembuatan pelaporan keuangan dan barang daerah;

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Minahasa menyusun dokumen RENSTRA yang merupakan dokumen perencanaan taktis strategis, yang memuat tujuan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Minahasa dengan berpedoman pada RPJPDP Kabupaten Minahasa 2005 – 2025 yang

mempunyai visi “Minahasa yang mandiri dan sejahtera” mendukung tercapainya visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Minahasa menjabarkan dalam misi yaitu :

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang maju dan mampu mandiri dengan budaya *Si Tou Timou Tumou Tou*;
2. Mewujudkan Minahasa yang mampu berkompetisi dan tetap mempertahankan budaya *Mapalus*;
3. Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip HAM, Demokrasi, Supremasi dan Kepastian Hukum;
4. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya agar berkelanjutan;
5. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, dan Makmur

Berdasarkan pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Minahasa, yang berkaitan secara langsung dengan tupoksi BPKAD adalah misi ke Dua yaitu Mewujudkan Minahasa yang mampu berkompetisi dan tetap mempertahankan budaya *Mapalus*. yang dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran BPKAD sebagai berikut :

TABEL 3.1
FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG
TERHADAP PENCAPAIAN VISI MISI RPJPD Kabupaten Minahasa 2005 – 2025

VISI : Minahasa yang Mandiri dan Sejahtera						
NO	MISI	SASARAN KABUPATEN MINAHASA	INDIKATOR SASARAN KABUPATEN MINAHASA	TUJUAN BPKAD	INDIKATOR TUJUAN BPKAD	SASARAN BPKAD
1	Misi No 3 : Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip HAM, Demokrasi, Supremasi dan Kepastian Hukum	1. Perwujudan Minahasa yang berdaya saing, kompetitif berbasis budaya Mapalus	1. NTP dan NTN (NTBP), Indeks Kemudahan Berinvestasi, (Struktur Industri), Indeks Kepuasan Masyarakat, Opini BPK, Nilai Akuntabilitas Pemerintah (SAKIP), Indeks Reformasi Birokrasi, Kualifikasi Penilaian Penerapan Sistem Merit	1. Mewujudkan Kepatuhan terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	OpiniBPK WTP	1. Terwujudnya Kepatuhan terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran 1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan
				2. Meningkatkan kualitas pengelolaan		

keuangan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

Kepuasan Stakeholder Terhadap Pelayanan Perangkat Daerah

3.3. Penentuan Isu – isu Strategis

Untuk mendukung pelaksanaan Kabupaten Minahasa khususnya pada misi kedua dan sasaran pertama, berikut strategi yang dirumuskan Kabupaten Minahasa dan dituangkan dalam RPJPDP:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
2. Mengurangi ketimpangan pengeluaran dan pendapatan masyarakat Minahasa
3. Meningkatkan pendapatan petani dan nelayan
4. Memastikan kemudahan berinvestasi
5. Mempertahankan kategori WTP
6. Meningkatkan nilai SAKIP
7. Meningkatkan kualitas birokrasi
8. Menerapkan sistem merit
9. Meningkatkan jumlah/persentase koperasi aktif, dan permodalan UKM/IKM
10. Meningkatkan destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif

Strategi diatas di terjemahkan dalam beberapa strategi yang ditempuh oleh BPKAD Kabupaten Minahasa dalam mencapai tujuan dan sasaran BPKAD diatas, BPKAD Kabupaten Minahasa melaksanakan upaya sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola keuangan dan aset berbasis IT;
2. Meningkatkan kualitas sistem pengendalian, pengelolaan dan informasi keuangan daerah dan pengelolaan aset dalam rangka mewujudkan pelayanan prima;
3. Meningkatkan proses penyusunan APBD yang aspiratif, transparan dan akuntabel yang berorientasi kepada anggaran kinerja;
4. Menyusun perencanaan pengadaan dan pemanfaatan aset;
5. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD;

6. Pengaturan pengelolaan keuangan dan aset yang efisien, efektif dan akuntabel;
7. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah berbasis IT yang efisien dan efektif;
8. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan keuangan dan aset;
9. Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Minahasa;
10. Meningkatkan pembinaan, koordinasi dan perencanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
11. Meningkatkan pelayanan dan fasilitasi bagi Perangkat Daerah dan pihak ketiga serta Stakeholder di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan BPKAD

Tujuan BPKAD merupakan penjabaran visi dan misi Kabupaten Minahasa. Misi yangterkait dengan tupoksi BPKAD Kabupaten Minahasa merupakan misi kelima yaitu: “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota”. Misi ini dicapai dan dijabarkan dalam tujuan BPKAD yaitu:

“Mewujudkan Kepatuhan terhadap Kebijakan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tinggi”

Pencapaian tujuan diatas, dapat diukur dengan pemenuhan beberapa indikator dibawah, meliputi :

Tabel 4.1

Perumusan Indikator Tujuan Jangka Menengah BPKAD

N O	Tuju an	Indikator Tujuan	2024	2025	2026
1	Mewujudkan Kepatuhan terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tinggi	Opini BPK	WTP	WTP	WTP

4.2 SASARAN BPKAD

Sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka pengelolaan keuangan dan asset daerah. Sasaran yang ingin dicapai tersebut adalahsebagai berikut :

1. Terwujudnya Kepatuhan terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tinggi

Salah satu tujuan pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah tercapainya pengelolaan keuangan yang akuntabel. Akuntabilitas keuangan pemerintah memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akuntabilitas pemerintah juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pengawasan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintah. Akuntabilitas pemerintah juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawas fungsional secara efektif dan efisien. Terwujudnya akuntabilitas keuangan daerah akan menjadi landasan awal bagi tatakelola pemerintahan yang lebih baik dan segala pertanggung jawaban keuangan yang berasal dari dana masyarakat akan berjalan lancar seiring kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Salah satu cara untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan. Hal ini tertuang pada sasaran kinerja BPKAD yang pertama yaitu mendorong agar seluruh Perangkat Daerah mematuhi kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Selanjutnya, untuk pengelolaan aset sebagaimana pengelolaan keuangan daerah juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabilitas yang sesuai dengan prinsip *good governance*.

Fungsi dari pengelolaan aset daerah adalah untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat agar lebih optimal melalui:

- a. Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah, baik menyangkut inventarisasi tanah dan bangunan, sertifikasi kekayaan daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah;
- b. Terciptanya efesiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah;
- c. Pengamanan aset daerah dan;
- d. Tersedianya data atau informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah.

Dalam Permendagri Nomor 19 tahun 2016 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan barang daerah adalah Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Untuk melakukan pengelolaan aset yang baik, pemerintah pusat maupun daerah telah menyusun kebijakan pengelolaan aset pada setiap tahapannya sesuai dengan Permendagri Nomor 19 tahun 2016. Sesuai dengan tupoksi BPKAD, untuk mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, maka BPKAD akan mendorong agar Perangkat Daerah dapat memtuhikan kebijakan pengelolaan aset daerah.

2. Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran.

Manajemen Perkantoran dapat didefinisikan sebagai kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakkan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Tujuan dari manajemen perkantoran adalah kegiatan perkantoran di BPKAD dapat dilakukan secara efisien dan efektif sehingga dapat menunjang pencapaian tujuan utama BPKAD.

Pencapaian sasaran diatas, dapat diukur dengan pemenuhan beberapa indikator dibawah (sebelum dan sesudah perubahan), meliputi:

TABEL 4.2

Perumusan Indikator Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

No	Sasaran BPKAD	Indikator Kinerja BPKAD		Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-		
					1	2	3
1	Terwujudnya kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tinggi	1.	Perda APBD Tepat waktu		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
		2.	Perda Pertanggungjawaban APBD tepat waktu		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
		3.	Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total dalam APBD	%	6,75%	6,50%	6,30%
		4.	Ratio Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	61,63 %	62,00 %	62,20 %
		5.	Ratio PAD	%	8,07%	8,27%	8,47%
		6.	Ratio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi transfer expenditure)	%	80,32 %	80,42 %	80,72 %
		7.	Opini Laporan Keuangan		WTP	WTP	WTP
		8.	Deviasi Realisasi PAD terhadap Total PAD dalam APBD	%	4,83%	4,93%	5,23%
		9.	Ratio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	1,77%	1,75%	1,73%
		10.	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah Tinggi	%	85	85	85
		11.	Manajemen Aset	%	85	85	85
2	Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran		%	80	80	80

TABEL 4.2

TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN				TARGET					
			SASARAN	1	2	3	4					
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Mewujudkan Kepatuhan terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tinggi		1. Terwujudnya kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan Asset Daerah Tinggi.	1. Perda APBD Tepat waktu	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	TEPAT WAKTU	-6,75%	-6,75%	-6.50%	-6,30%
				Opini BPK Terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP				

3. Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD	61,63%	61,63%	62,20%	62,20%
4. Ratio Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan	8,07%	8,07%	8,27	8,47%
5. Ratio PAD	80,32%	80,32%	80,42%	80,72%
6. Ratio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi transfer expenditure)	WTP	WTP	WTP	WTP
7. Opini Laporan Keuangan	1,77%	1,77%	1,75%	1,73%
8. Deviasi Realisasi PAD terhadap Total PAD dalam APBD	-4,83%	-4,83%	-4,93%	5,23%
9. Ratio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	100 %	100 %	100 %	100 %
10. Tingkat kepatuhan terhadap kebijakan	80%	82%	85%	88%

2. Terpenuhi dukungan manajemen Perkantoran	pengelolaan asset daerah tinggi	80%	82%	84%	85%
	11. Manajemen ASET				
	1. Tingkat Pemuhan				
	Dukungan manajemen				
	perkantoran				

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan BPKAD

Dalam melakukan perumusan strategi yang akan dilakukan, BPKAD memperhatikan kekuatan internal yang sudah ada seperti posisi organisasi yang lebih baik, pemanfaatan sistem informasi, peningkatan profesionalisme dan integritas aparatur BPKAD. Selain itu, BPKAD juga dapat memanfaatkan peluang yang ada agar dapat dimanfaatkan sebagai dukungan bagi BPKAD dalam melaksanakan tupoksinya seperti peran BPKAD yang strategis, mudah berkoordinasi dengan pusat, kualitas dan kapabilitas SDM pengelola keuangan dan aset yang masih bisa dikembangkan, komitmen pimpinan untuk menyelesaikan permasalahan aset daerah dan potensi aset daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Kemudian selain memanfaatkan kekuatan dan peluang, BPKAD juga akan meminimalisir faktor kelemahan internal seperti :

1. Pengembangan dan pemanfaatan SIPKD di setiap Perangkat Daerah belum optimal;
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi personil Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tupoksi pengelolaan keuangan dan barang milik daerah belum memadai;
3. Belum optimalnya penyediaan instrumen penganggaran berbasis kinerja yang efektif, efisien dan akuntabel;
4. Akurasi data dan ketepatan waktu pencairan anggaran kegiatan;
5. Pengintegrasian sistem aplikasi pengelolaan keuangan dan aset;
6. Belum jelasnya status kepemilikan beberapa aset-aset milik daerah;

Kedepan, BPKAD juga harus dapat menjawab tantangan yang ada seperti :

1. Profesionalisme dan integritas SDM pengelola keuangan dan aset masih perlu ditingkatkan;
2. Penerapan teknologi informasi (aplikasi) belum terintegrasi.
3. Masyarakat semakin kritis informasi semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat;
4. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah;
5. Bertambahnya anggaran yang menimbulkan meningkatnya jumlah paket pengadaan barang dan jasa;
6. Tuntutan transparansi informasi publik menuju *good governance*;
7. Penerapan sistem akuntansi berbasis akrual;
8. Informasi semakin terbuka dan perubahan peraturan yang sangat cepat.

Tabel 5.1

Perumusan Strategis BPKAD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Strategi
1	Terwujudnya kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tinggi	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tinggi	• Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian, Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah DalamRangka Mewujudkan PelayananPrima; • Meningkatkan proses penyusunan APBD yang aspiratif, transparan dan akuntabel yang berorientasi kepada anggaran kinerja; • Meningkatkan akuntabilitas Pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD; • Meningkatkan Sistem PengelolaanKeuangan Daerah Berbasis IT yangEfisien dan Efektif; • Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan PemerintahKabupaten Minahasa; • Meningkatkan pembinaan, koordinasi dan perencanaan pengelolaan keuangan daerah • Meningkatkan pelayanan dan fasilitasi bagi PD Pihak Ketiga serta Stakeholder di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa • Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian, Pengelolaan dan Informasi Aset Dalam RangkaMewujudkan Pelayanan Prima; • Menyusun perencanaan pengadaan dan pemanfaatan aset; • Pengaturan Pengelolaan aset yang efisien, efektif dan akuntabel; • Meningkatkan Sistem Pengelolaan aset Daerah Berbasis IT yang Efisien dan Efektif;

2.	Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran	• Meningkatkan pembinaan, koordinasi dan perencanaan pengelolaan aset daerah; • Meningkatkan Sarana dan prasarana pengelolaan keuangan dan aset.; • Meningkatkan pelayanan dan fasilitasi bagi PD dan Pihak Ketigaserta Stakeholder di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa • Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan dan Aset berbasis IT
----	---	--	---

5.2 Arah Kebijakan BPKAD

Memperhatikan peran BPKAD yang diberi amanat besar dalam melakukan pengelolaan keuangan dan aset serta pembinaan pengelolaan keuangan pemerintah kabupaten Minahasa, maka BPKAD wajib melakukan sinergi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahaasa, DPRD, Pemerintah Provinsi dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder). Sinergi dan koordinasi wajib diterapkan dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Rumusan arah kebijakan dan strategi pengelolaan keuangan dan aset BPKAD terkait antara satu dengan lainnya. Kebijakan BPKAD merupakan penjabaran dari urusan pemerintahan sesuai dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Minahasa yang berisi satu atau beberapa upaya untuk mencapai sasaran strategis pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan indikator kinerja yang terukur. Untuk mencapai sasaran strategis yang dirumuskan sebelumnya, dibuatlah strategi-strategi BPKAD

sebagai langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan BPKAD.

Dengan mengacu pada kerangka kebijakan dan strategi di atas, pengelolaan keuangan dan aset yang dilakukan oleh BPKAD diarahkan untuk mencapai sasaran terwujudnya kualitas manajemen pengelolaan keuangan dan aset yang bersih, efektif dan akuntabel. Kebijakan pengelolaan keuangan dan aset BPKAD juga diarahkan untuk mencapai terwujudnya penguatan sinergisitas dan koordinasi, terwujudnya penguatan sistem dan prosedur, terwujudnya profesionalisme aparatur pengelola keuangan dan aset, serta terwujudnya sistem manajemen pengelolaan keuangan dan aset berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Arah kebijakan pengelolaan keuangan dan aset BPKAD secara rinci sebagai berikut :

1. Membangun dan meningkatkan komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas;
2. Memperkuat kelembagaan dan tatakelola keuangan pemerintah daerah berbasiskan *e-government* yang terintegrasi dengan baik, meliputi proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset milik daerah;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan aset agar mampu mendukung pelayanan dan dapat memberikan masukan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Minahasa
4. Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan membangun serta meningkatkan sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi dengan stakeholders guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan asset daerah

TABEL 5.2

Tujuan, Sasaran Strategi dan Kebijakan BPKAD

VISI Kab. Minahasa: Minahasa yang Mandiri dan Sejahtera			
MISI Ketiga Kab. Minahasa: Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip HAM, Demokrasi, Supremasi dan Kepastian Hukum			
TUJUAN BPKAD	SASARAN BPKAD	STRATEGI	KEBIJAKAN
Mewujudkan Kepatuhan terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tinggi	1. Terwujudnya Kepatuhan terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tinggi	- Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian, Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah DalamRangka Mewujudkan PelayananPrima; - Meningkatkan proses penyusunan APBD yang aspiratif, transparan dan akuntabel yang berorientasi kepada anggaran kinerja; - Meningkatkan akuntabilitas Pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD; - Meningkatkan Sistem PengelolaanKeuangan Daerah Berbasis IT yangEfisien dan Efektif; - Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan PemerintahKabupaten Minahasa; - Meningkatkan pembinaan, koordinasi dan perencanaan pengelolaan keuangan daerah - Meningkatkan pelayanan dan fasilitasbagi PD Pihak Ketiga serta Stakeholder di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa - Meningkatkan Kualitas Sistem Pengendalian, Pengelolaan dan Informasi Aset Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Prima; - Menyusun perencanaan pengadaan dan pemanfaatan aset; - Pengaturan Pengelolaan aset yang efisien, efektif dan akuntabel; - Meningkatkan Sistem Pengelolaan aset Daerah Berbasis IT yang Efisien dan Efektif; - Meningkatkan pembinaan, koordinasi dan perencanaan	- Memperkuat kelembagaan dan tatakelola keuangan pemerintah daerah berbasis e-government yang terintegrasi dengan baik, meliputi proses perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan dan aset milik daerah - Mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan membangunserta meningkatkan sinergitas, koordinasi, dan kolaborasi dengan stakeholders guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset daerah - Mengoptimalkan pemanfaatanaset agar mampu mendukung pelayanan dan dapat memberikan masukan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD)serta bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Minahasa - Membangun dan Meningkatkan komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk

	2. Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran	pengelolaan aset daerah; • Meningkatkan Sarana dan prasarana pengelolaan keuangan dan aset.; • Meningkatkan pelayanan dan fasilitas bagi PD, dan Pihak Ketiga serta Stakeholder di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa • Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan dan Aset berbasis IT	mewujudkan akuntabilitas • Menerapkan kebijakan pola kerja, yang sesuai dengan potensi dan kondisi daerah sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Pusat dalam menetapkan kebijakan Nasional yang strategis dengan memperhatikan kepentingan Daerah.
--	--	--	--

BAB VI**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan daerah sehingga baik tujuan maupun sasaran yang direncanakan dan telah ditetapkan dapat dicapai. Penetapan program dilakukan dengan melihat kebijakan yang telah ditetapkan, tujuan, sasaran, visi dan misi.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan, 53 indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Minahasa. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

RENSTRA 2024-2026

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MINAHASA

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASSET DAERAH**

ASET DAERAH																	
TUJUAN	SASARAN	Kode					Uraian	Indikator Kinerja Program /Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2023)	2024		2025		2026		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		1	2	3	4	5				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Mewujudkan Kepatuhan terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tinggi		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	18	19
		5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				287,604,922,138		300,578,657,120		309,079,845,005		
		5	2				KEUANGAN				287,604,922,138		300,578,657,120		309,079,845,005		BPKAD
	Terpenuhi						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilasi SAKIP	B	BB		BB	18,271,257,120	BB	19,762,695,005	BB	BPKAD

						9220	9220	9220	9230	9240	9240	
					Nilai IKM	9220	9220	9220	9230	9240	9240	
					Jumlah Dokumen Perencanaan yang ditetapkan Jumlah Dokumen Penganggaran yang ditetapkan Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang ditetapkan	3	3	3	3	3	3	
					Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20		150,700,000	8	150,700,000	8	BPKAD
						1			1		1	
						5						
						2						
						1						

RENSTRA 2024-2026

		5	2	1	20	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	14,900,000	3 Dokumen	14,900,000	3 Dokumen	14,900,000	3 Dokumen	BPKAD
		5	2	1	20	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2 Dokumen	15,018,000	2 Dokumen	15,018,000	2 Dokumen	15,018,000	2 Dokumen	BPKAD
		5	2	1	20	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	15,018,000	2 Dokumen	15,018,000	2 Dokumen	15,018,000	2 Dokumen	BPKAD
		5	2	1	20	1	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	2 Dokumen	7,924,000	2 Dokumen	7,924,000	2 Dokumen	7,924,000	2 Dokumen	BPKAD

RENSTRA 2024-2026

		5	2	1	20	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	87,840,000	2 Laporan	87,840,000	2 Laporan	87,840,000	2 Laporan	BPKAD
		5	2	1	20		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan yang Teradiministrasi	100%	8,051,247,500	100%	13,848,940,120	100%	15,040,518,665	100%	BPKAD
		5	2	1	20	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 laporan	8,009,761,000	1 laporan	13,752,940,120	1 laporan	13,752,940,120	1 laporan	BPKAD
		5	2	1	20	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	13,486,500	1 Laporan	48,000,000	1 Laporan	48,000,000	1 Laporan	BPKAD

RENSTRA 2024-2026

						1 Laporan	1 Laporan	28,000,000	1 Laporan	48,000,000	1 Laporan	48,000,000	1 Laporan	48,000,000	1 Laporan	BPKAD
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan dan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan dan Semesteran SKPD	1 Laporan	95%	1 Laporan	95%	1 Laporan	951,280,000	95%	1,104,080,000	95%	BPKAD
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terfasilitasi	1 unit	95%	1 unit	0	1 Unit	0	1 unit	2,800,000	1 unit	BPKAD
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	20	1	20	1	5	5	5	5	BPKAD
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah laporan pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2	20	1	20	1	5	5	5	5	BPKAD

		5	2	1	20	1	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah laporan hasil Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Laporan	627,111,040	1 Laporan	750,000,000	1 Laporan	900,000,000	1 Laporan	BPKAD
		5	2	1	20			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Terasiliasi	100%	1,410,427,966	100%	1,426,545,000	100%	1,509,287,500	100%	BPKAD
		5	2	1	20	1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	10,375,836	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	17,000,000	1 Laporan	BPKAD
		5	2	1	20	2	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	380,896,053	1 Laporan	412,000,000	1 Laporan	414,000,000	1 Laporan	BPKAD

RENSTRA 2024-2026

		5	2	1	20	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Laporan	1 Laporan	15,066,077	1 Laporan	17,500,000	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	BPKAD
		5	2	1	20	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah laporan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Laporan	1 Laporan	47,250,000	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	52,500,000	1 Laporan	BPKAD
		5	2	1	20	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	132,500,000	1 Laporan	140,000,000	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	BPKAD
		5	2	1	20	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	824,340,000	1 Laporan	850,000,000	1 Laporan	875,000,000	1 Laporan	BPKAD
		5	2	1	20		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai RKBM	90%	90%	367,507,603	90%	510,000,000	90%	465,000,000	90%	BPKAD
		5	2	1	20	5	Pengadaan Mebel	Jumlah laporan pengadaan Mebel	1 Laporan	1 Laporan	60,000,000	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	BPKAD

RENSTRA 2024-2026

			5	2	1	20	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Laporan	307,507,603	1 Laporan	330,000,000	1 Laporan	340,000,000	1 Laporan	BPKAD
			5	2	1	20		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	964,602,000	100%	1,013,792,000	100%	1,016,792,000	100%	BPKAD
			5	2	1	20	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	18,000,000	12 Laporan	18,000,000	12 Laporan	18,000,000	12 Laporan	BPKAD
			5	2	1	20	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	330,792,000	12 Laporan	330,792,000	12 Laporan	330,792,000	12 Laporan	BPKAD
			5	2	1	20	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	1 Laporan	23,010,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	28,000,000	1 Laporan	BPKAD

RENSTRA 2024-2026

									Perengkapan Kantor yang Disediakan		12 Laporan	592,800,000	12 Laporan	640,000,000	12 Laporan	640,000,000	12 Laporan	BPKAD
									Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	4	208	21					BPKAD
									Persentase Barang Milik Daerah yang Terpelihara sesuai RKPBMID	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		209	21					BPKAD
									Jumlah laporan penyediaan jasa biaya pemeliharaan kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	209	21					BPKAD

RENSTRA 2024-2026

		5	2	1	2019	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah laporan pemeliharaan Mebel	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	BPKAD
		5	2	1	2019	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	BPKAD
		5	2	1	2019	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah laporan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	0	1 Unit	100,000,000	1 Unit	200,000,000	1 Unit	BPKAD
	Terwujudnya kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan daerah tinggi	5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tinggi	100%	274,673,398,566	100%	281,005,400,000	100%	287,821,400,000	100%	BPKAD

RENSTRA 2024-2026

			5	2	2	20		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase meningkatnya pengendalian dan perencanaan keuangan Daerah	100%	100%	1,106,484,301	100%	1,192,400,000	100%	1,281,400,000	100%	BPKAD
			5	2	2	20	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	204,523,017	2 Dokumen	220,000,000	2 Dokumen	240,000,000	2 Dokumen	BPKAD
			5	2	2	20	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	215,262,891	2 Dokumen	225,000,000	2 Dokumen	240,000,000	2 Dokumen	BPKAD
			5	2	2	20	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah laporan koordinasi, penyusunan RKA – SKPD	1 Laporan	1 Laporan	10,015,639	1 Laporan	12,000,000	1 Laporan	12,000,000	1 Laporan	BPKAD
			5	2	2	20	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah laporan koordinasi, penyusunan Perubahan RKA – SKPD	1 Laporan	1 Laporan	11,018,130	1 Laporan	12,000,000	1 Laporan	13,000,000	1 Laporan	BPKAD
			5	2	2	20	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Jumlah laporan koordinasi,	1 Laporan	1 Laporan	11,526,394	1 Laporan	12,500,000	1 Laporan	13,000,000	1 Laporan	BPKAD

										penyusunan DPA – SKPD									
										Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah laporan koordinasi, penyusunan Perubahan DPA – SKPD	1 Laporan	11,018,130	1 Laporan	12,000,000	1 Laporan	13,000,000	1 Laporan	BPKAD
										Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	205,573,320	2 Dokumen	225,000,000	2 Dokumen	247,500,000	2 Dokumen	BPKAD
										Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	208,173,495	2 Dokumen	220,000,000	2 Dokumen	240,000,000	2 Dokumen	BPKAD

RENSTRA 2024-2026

		5	2	2	20	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Regulasi	1 Regulasi	12,702,162	1 Regulasi	13,500,000	1 Regulasi	15,000,000	1 Regulasi	BPKAD
		5	2	2	20	1 0	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 laporan	1 laporan	14,000,000	1 laporan	15,400,000	1 laporan	17,900,000	1 laporan	BPKAD
		5	2	2	20	1 1	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Belanja Daerah	1 laporan	1 laporan	0	1 laporan	10,000,000	1 laporan	10,000,000	1 laporan	BPKAD
		5	2	2	20	1 2	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 laporan	1 laporan	0	1 laporan	10,000,000	1 laporan	10,000,000	1 laporan	BPKAD
		5	2	2	20	1 3	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kot a	1 laporan	1 laporan	202,671,123	1 laporan	205,000,000	1 laporan	210,000,000	1 laporan	BPKAD

RENSTRA 2024-2026

		5	2	2	20		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase meningkatnya pengelolaan Belanja Daerah	100%	100%	501,203,090	100%	100%	593,000,000	100%	707,000,000	100%	BPKAD
		5	2	2	20	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	100%	100%	276,000,000	100%	100%	300,000,000	100%	325,000,000	100%	BPKAD
		5	2	2	20	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah laporan hasil penyiapan, pelaksanaan, pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	100%	100%	33,615,033	100%	100%	40,000,000	100%	45,000,000	100%	BPKAD

			5	2	2	20	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	1 Laporan	1 Laporan	22,536,996	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	35,000,000	1 Laporan	BPKAD
								Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	1 Laporan	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	28,000,000	1 Laporan	32,000,000	1 Laporan	BPKAD

			5	2	2	20	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah laporan Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	49,482,360	1Dokum en	60,000,000	1 Doku men	75,000,000	1 Dokumen	BPKAD
			5	2	2	20	1 0	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis yang Disusun	1 Juknis	1 Juknis	1 Juknis	25,570,330	1 Juknis	30,000,000	1 Juknis	35,000,000	1 Juknis	BPKAD

			5	2	2	20	1	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Laporan	19,516,011	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	BPKAD
			5	2	2	20	1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Daerah	100%	973,515,253	100%	1,210,000,000	100%	1,313,000,000	100%	1,313,000,000	100%	BPKAD
			5	2	2	20	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan	136,687,398	18 Laporan	146,000,000	18 Laporan	160,000,000	18 Laporan	160,000,000	18 Laporan	BPKAD

				5	2	2	20	3		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	202,973,868	2 Dokumen	228,000,000	2 Dokumen	252,000,000	2 Dokumen		BPKAD
										Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	55,000,000	1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen		BPKAD

RENSTRA 2024-2026

			5	2	2	20	7	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Laporan	193,177,488	1 Laporan	198,000,000	1 Laporan	202,000,000	1 Laporan	BPKAD
			5	2	2	20	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Kebijakan	76,679,910	1 Kebijakan	82,000,000	1 Kebijakan	90,000,000	1 Kebijakan	BPKAD

RENSTRA 2024-2026

		5	2	2	20	1	0	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Sisdur	1 Sisdur	0	1 Sisdur	75,000,000	1 Sisdur	80,000,000	1 Sisdur	BPKAD
		5	2	2	20	1	1	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	77,818,215	1 Laporan	150,000,000	1 Laporan	175,000,000	1 Laporan	BPKAD
		5	2	2	20			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terpenuhi	100%	100%	272,092,195,922	100%	278,000,000,000	100%	284,500,000,000	100%	BPKAD
		5	2	2	20	4	4	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan	1 Laporan	1 Laporan	10,516,699,422	1 Laporan	10,516,699,422	1 Laporan	10,516,699,422	1 Laporan	BPKAD

RENSTRA 2024-2026

		5	2	2	20		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Pengelolaan SIPD	100%	100%	0	100%	10,000,000	100%	20,000,000	100%	BPKAD
		5	2	2	20	2	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	BPKAD
	Terwujudnya kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan asset daerah tinggi	5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah Tinggi	100%	100%	1,158,647,463	100%	1,302,000,000	100%	1,424,000,000	100%	BPKAD
		5	2	3	20	1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan BMD sesuai aturan	100%	100%	1,158,647,463	100%	1,302,000,000	100%	1,424,000,000	100%	BPKAD

		5	2	3	201	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	79,400,000	1 Dokumen	85,000,000	1 Dokumen	90,000,000	1 Standar Harga	BPKAD
		5	2	3	201	2	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Dokumen Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	BPKAD
		5	2	3	201	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	BPKAD
		5	2	3	201	4	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Kebijakan	1 Kebijakan	19,519,250	1 Kebijakan	22,000,000	1 Kebijakan	24,000,000	1 Kebijakan	BPKAD
		5	2	3	201	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	327,797,639	1 Laporan	367,000,000	1 Laporan	377,000,000	1 Laporan	BPKAD

		5	2	3	201	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	66,400,000	1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan	BPKAD
		5	2	3	201	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	80,675,000	1 Laporan		1 Laporan	88,000,000	96,000,000	BPKAD
		5	2	3	201	8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	74,406,750	1 Laporan		1 Laporan	82,000,000	87,000,000	BPKAD

			5	2	3	201	9	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	33,700,000	1 Laporan	38,000,000	1 Laporan	42,000,000	1 Laporan	BPKAD
			5	2	3	201	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	0	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	BPKAD

RENSTRA 2024-2026

		5	2	3	20	1	1	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	181,120,000	1 Laporan	190,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	BPKAD
		5	2	3	20	1	2	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	181,120,000	1 Laporan	185,000,000	1 Laporan	190,000,000	1 Laporan	BPKAD
		5	2	3	20	1	3	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	114,508,824	1 Laporan	120,000,000	1 Laporan	128,000,000	1 Laporan	BPKAD



KEPALA BADAN

JOICE

JOICE MARHAENSJE PUA, SE
PEMBINA TKT I, IV/b
NIP. 196601201986112001

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Strategis PD (RENSTRA PD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa sangat erat kaitannya dengan dokumen visi dan misi RPJPDP 2005-2025 dan analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPDP 2005-2025, untuk itu dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen RPJPDP sebagai acuan untuk menetapkan indikator kinerja BPKAD Kabupaten Minahasa sehingga dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJPDP. Penetapan indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dengan rencana strategis organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPJPDP 2005-2025.

Adapun indikator kinerja PD yang telah ditetapkan untuk Tiga tahun kedepan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJPDP 2005-2025 dapat dilihat pada tabel C.28

TABEL CASCADING PERANGKAT DAERAH
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERA
KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2024 - 2026

VISI	MINAHASA YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA (RPJPD Kab. Minahasa Tahun 2005-2025)
MISI	Misi 3 :Meningkatkan Penerapan Prinsip-Prinsip HAM, Demokrasi, Supremasi Dan Kepastian Hukum
Tujuan Daerah	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih
Indikator Tujuan Daerah	Opini BPK WTP
Sasaran Daerah	Terwujudnya Kepatuhan terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah
Tujuan PD	Mewujudkan Kepatuhan terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tinggi
Indikator Tujuan PD	Opini BPK WTP
Sasaran PD	Terwujudnya kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan Aset daerah tinggi
Indikator Sasaran PD	1. 1. Perda APBD Tepat waktu
	2. Perda Pertanggungjawaban APBD Tepat waktu
	3. Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD

	4. Ratio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan
	5. Ratio PAD
	6. Ratio Belanja urusan pemerintahan umum dikurangi transfer expenditure
	7. Opini Laporan Keuangan
	8. Deviasi realisasi PAD terhadap total PAD dalam APBD
	9. Ratio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya
	10. Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah
	11. Manajemen Aset
PROGRAM	Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Program	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Tinggi
PROGRAM	Pengelolaan Barang Milik Daerah
Indikator Program	Tingkat Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pengelolaan Aset Daerah Tinggi
Sasaran PD 2	Terpenuhinya dukungan manajemen Perkantoran
Indikator Sasaran PD	Tingkat pemenuhan dukungan manajemen perkantoran
PROGRAM	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota
Indikator Program	1. Nilai SAKIP
	2. Nilai IKM

KEGIATAN	SEKRETARIS
	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Meningkatnya Penyelenggaraan Administrasi yang Efektif dan Efisien
	Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Kegiatan	SEKRETARIS
	Jumlah Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang dibuat
	Persentase Laporan Capaian Kinerja dan keuangan yang tersedia tepat waktu
	Persentase Kehadiran Pegawai sesuai Jam Kerja
	Jumlah Aparatur terlatih Pengelolaan Keuanagn Daerah
	Persentase penyediaan dan pengelolaan administrasi umum
	Persentase Kebutuhan BMD yang terpenuhi
	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Umum Kantor
	Persentase Pemeliharaan BMD

	Nilai IKM Perangkat Daerah
	Persentase Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang terpenuhi
KEGIATAN	KABID PERBENDAHARAAN
	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
Indikator Kegiatan	KABID PERBENDAHARAAN
	Persentase Meningkatnya Pengelolaan Belanja Daerah
	Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu sejak diterimanya pengajuan SPM sesuai Persyaratan
KEGIATAN	KABID ANGGARAN
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
Indikator Kegiatan	KABID ANGGARAN
	Persentase Meningkatnya Perencanaan dan Pengendalian Keuangan Daerah
KEGIATAN	KABID AKUNTANSI DAN VERIFIKASI
	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
Indikator Kegiatan	KABID AKUNTANSI DAN VERIFIKASI
	Persentase Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Daerah
KEGIATAN	KABID ASET
	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah
Indikator Kegiatan	KABID ASET
	Persentase Pengelolaan BMD sesuai aturan

SUB KEGIATAN	ANALIS KEBIJAKAN MUDA
	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Indikator Sub Kegiatan	ANALIS KEBIJAKAN MUDA
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
SUB KEGIATAN	KASUBAG PERLENGKAPAN
	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu
	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya
	Tersedianya Jasa Surat Menyurat
	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor
Indikator Sub Kegiatan	KASUBAG PERLENGKAPAN
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
SUB KEGIATAN	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH MUDA
	Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
	Terlaksananya Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
	Terlaksananya Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota

Indikator Sub Kegiatan	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH MUDA
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
SUB KEGIATAN	KASI PERENCANAAN ANGGARAN
	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Daerah
	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
Indikator Sub Kegiatan	KASI PERENCANAAN ANGGARAN
	Jumlah Kegiatan Verifikasi RKA-SKPD

	Jumlah Kegiatan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
	Jumlah Dokumen Perda APBD dan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
	Jumlah Dokumen Perubahan Perda APBD dan Perubahan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
SUB KEGIATAN	KASI PENGENDALIAN DAN OTORISASI
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD
	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
	Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Indikator Sub Kegiatan	KASI PENGENDALIAN DAN OTORISASI
	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS
	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan PPAS
	Jumlah Kegiatan Verifikasi DPA-SKPD
	Jumlah Kegiatan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
	Jumlah Regulasi
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja

	Jumlah SKPD yang dibina
SUB KEGIATAN	KASI PENGELOLAAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
	Terlaksannya Penyiapan Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Indikator Sub Kegiatan	KASI PENGELOLAAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN
	Jumlah Bulan Pengelolaan Kas Daerah
	Jumlah Anggaran Kas dan SPD
	Jumlah SKPD yang dibina
SUB KEGIATAN	KASI PENGAWASAN
	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
	Terlaksannya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran kas Daerah, Laporan aliran kas, dan pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
	Terlaksannya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait
	Terlaksananya Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan
Indikator Sub Kegiatan	KASI PENGAWASAN
	Jumlah Laporan Hasil Konsolidasi

	Jumlah Dokumen Perda tentang Pertanggungjawaban APBD dan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD
	Jumlah Kebijakan yang disusun
	Jumlah Sisdur yang disusun
SUB KEGIATAN	KASI SEKSI AKUNTANSI PEMBUKUAN
	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi pemerintah Daerah
	Terlaksananya Penyusunan system dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
Indikator Sub Kegiatan	KASI SEKSI AKUNTANSI PEMBUKUAN
	Jumlah Laporan Hasil Konsolidasi
	Jumlah Dokumen Perda tentang Pertanggungjawaban APBD dan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD
	Jumlah Kebijakan yang disusun
	Jumlah Sisdur yang disusun
SUB KEGIATAN	KASIE VERIFIKASI
	Terlaksananya Koordinasi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
	Terlaksananya Penyusunan Tanggapan / Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah

	Terlaksannya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
Indikator Sub Kegiatan	KASIE VERIFIKASI
	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban
	Jumlah Laporan Tindak Lanjut
	Jumlah Persidangan Tuntutan Ganti Rugi yang diadakan
	Jumlah SKPD yang Dibina
SUB KEGIATAN	KASI PEMBUKUAN DAN PENDATAAN ASET
	Terlaksannya Penyusunan Standar Harga
	Terlaksannya Penyusunan Standar Barang milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
	Terlaksannya Penatausahaan Barang Milik Daerah
	Terlaksannya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
	Terlaksannya Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah bersertifikat
Indikator Sub Kegiatan	KASI PEMBUKUAN DAN PENDATAAN ASET
	Jumlah Standar Harga yang Disusun
	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah
	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun
SUB KEGIATAN	KASI PEMBINAAN DAN EVALUASI

	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah
	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah
	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
Indikator Sub Kegiatan	KASI PEMBINAAN DAN EVALUASI
	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
	Jumlah laporan hasil pembinaan pengelolaan BMD

BAB VII

PENUTUP

RENSTRA PD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa adalah merupakan penjabaran program Perubahan RPJPD Kabupaten Minahasa Tahun 2005 - 2025 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Tujuan penyusunan Rancangan awal RENSTRA PD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2024 – 2026 adalah membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/strategi pembangunan, tujuan dan sasaran strategis yang ingin dicapai selama sisa periode ke depan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah selama sisa periode ke depan

Keberhasilan dan implementasi pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kabupaten Minahasa Tahun 2024 - 2026 sangat tergantung dari komitmen, kesepakatan, kesepahaman Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa mulai dari pimpinan sampai dengan pelaksana.


KEPALA BADAN

JOICE MARHEANSJE PUA, SE
PEMBINA TKT I, IV/b
NIP. 196601201986112001